



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

---

Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 10 (sepuluh)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Pelindungan Pekerja Migran/BP2MI, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Atase Ketenagakerjaan di Arab Saudi  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 28 April 2025  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Acara :

1. Membahas rencana pencabutan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
2. Membahas implementasi tata kelola pelindungan yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum keberangkatan, selama bekerja dan kepulangan ke tanah air.
3. Membahas penguatan peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) dalam hal pengawasan dan perlindungan serta integrasi data Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
4. Membahas mekanisme pemberian bantuan hukum dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi dan kekerasan.
5. Evaluasi penanganan PMI yang menjadi korban TPPO khususnya di negara Kamboja, Myanmar dan Laos.

  
Ketua Rapat : Charles Honoris / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Hadir : A. Anggota DPR RI  
26 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI

## B. Pemerintah

- Menteri Pelindungan Pekerja Migran/BP2MI; H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si beserta jajaran.
- Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan; Drs. Aris Wahyudi, M.Si beserta jajaran.
- Atase Ketenagakerjaan KBRI Riyadh, Arab Saudi; Kholid Ibrahim, S.T beserta jajaran.
- Staf Teknis Ketenagakerjaan KJRI Jeddah, Arab Saudi; Handoyo Nugroho, S.E., M.Si (Daring).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran/BP2MI dibuka pukul 13.15 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk segera mengupayakan adanya perjanjian kerja sama bilateral (*Government to Government/G-to-G*) dengan Arab Saudi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
2. Komisi IX DPR RI mendukung pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan catatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI segera memastikan adanya pemenuhan prinsip jaminan pelindungan maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk adanya perjanjian kerja yang adil dengan pemberi kerja berbadan hukum, kepastian sistem pemantauan evaluasi, jaminan sosial, gaji minimum, jam kerja layak, dan kepastian hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi dengan sistem pemerintahan Arab Saudi dan hukum internasional.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk mengoptimalkan tata kelola perlindungan PMI sebelum keberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja serta memberikan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan hukum melalui:
  - a. Sistem layanan pengaduan 24 Jam (*Crisis Centre KP2MI*),
  - b. Koordinasi pendampingan hukum di negara penempatan dengan K/L terkait,

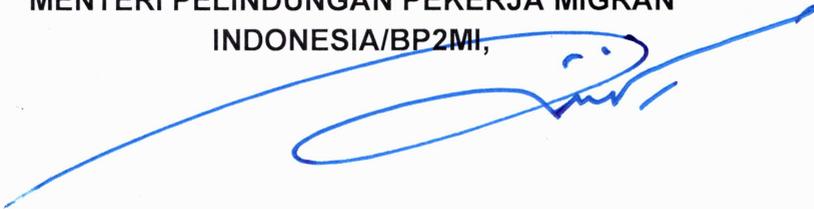
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama lintas kementerian/lembaga.
4. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dan K/L terkait untuk memperkuat pencegahan terhadap PMI non prosedural dan PMI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini paling lambat 5 Mei 2025.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 28 April 2025

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BP2MI,**



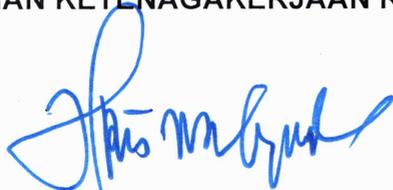
H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si

**KETUA RAPAT,**



CHARLES HONORIS  
A-176

**Pit. SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI,**



Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si